

PERDAGANGAN

2021

PERMENDAG NOMOR 54 TAHUN 2021 BN 2021/NO 1077, 7 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2021 TENTANG PENUGASAN GUBERNUR ATAU BUPATI/WALI KOTA DALAM RANGKA PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN/REVITALISASI SARANA PERDAGANGAN BERUPA PUSAT PROMOSI PRODUK UNGGULAN DAERAH DAN PUSAT JAJANAN KULINER DAN CINDERAMATA YANG DIDANAI MELALUI DANA TUGAS PEMBANTUAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

ABSTRAK :- bahwa untuk menindaklanjuti refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan *Coroner Virus Disease 2019 (COVID-19)*, perlu menyesuaikan alokasi daerah dan anggaran penerima dana tugas pembantuan kegiatan pembangunan/ revitalisasi sarana perdagangan berupa pusat provost produk unggulan daerah dan pusat jajanan ktiliner dan cenderamata sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Perdagangan ini adalah : Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU No 17 Tahun 2003 , UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No 39 Tahun 2008, UU No 7 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2020, UU No 11 Tahun 2020, PP No 7 Tahun 2008, PP No. 27 Tahun 2014, PP No 29 Tahun 2021, Perpres No 48 Tahun 2015, PMK No 156/PMK.07/2008, Permendag N0 80 Tahun 2020, Permendag No 40 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Menteri Perdagangan ini diatur tentang :

Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Gubernur atau Bupati/Wali Kota dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/ Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pusat Provost Produk Unggulan Daerah dan Pusat Jajanan Kuliner dan Cenderamata yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 I (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 754)

CATATAN:

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan diundangkan pada tanggal 23 September 2021